

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Hal ini menurut Maliki (Clifford Geertz 2004 : 132) menyebutkan bahwa “tingkat persebaran agama, khususnya Islam di Indonesia begitu luas, meski dia melihat intensitas penghayatan masyarakat nusantara ini tidak terlalu menggebu-gebu, bahkan bagi komunitas tertentu, Jawa misalnya berlangsung secara sinkretik”. Kenyataan dari fakta tersebut mengakibatkan Islam dengan mudah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, sehingga Indonesia menjadi salah satu Negara yang penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia.

Kalangan Islam di Indonesia memiliki cita-cita mendirikan Negara Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara (Syukur, 2003:17). Semua upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut selalu mengalami kegagalan pada saat sidang BPUPKI 1945, sidang Konstituante 1957-1959, dan sidang MPRS 1968. Proses politik dari Orde Lama hingga Orde Baru meninggalkan kenangan pahit bagi kalangan Islam yang selalu mengalami kegagalan untuk mewujudkan cita-citanya yaitu menjadikan Negara yang bersyari'at Islam, kegagalan ini sangat ironis sekali mengingat kenyataan statistik, Islam dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi bukti pasti kegagalan perjuangan kalangan Islam, dikarenakan menurut umat

Muslim sila-sila dalam pancasila merupakan bagian dari dalam syari'at Islam itu sendiri. Pancasila dipandang sebagai dasar Negara yang paling sesuai dengan kondisi dan perkembangan politik Indonesia (Santosa, 2004 : 95).

Namun salah satu faktor pendorong terbentuknya Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah dikotomi sistem pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia yang merupakan warisan kolonialisme Belanda, yaitu pondok pesantren dan sekolah umum. Masing-masing dinilai memiliki orientasi yang berbeda. Pondok pesantren berorientasi ke akhirat sementara sekolah umum berorientasi ke dunia. Akibatnya pelajar Islam juga terbelah menjadi dua kekuatan yang satu sama lain saling menjatuhkan. Santri pondok pesantren menganggap sekolah umum merupakan sistem pendidikan orang kafir karena produk kolonial Belanda. Hal ini membuat para santri menjuluki pelajar sekolah umum dengan "pelajar kafir". Sementara pelajar sekolah umum menilai santri pondok pesantren kolot dan tradisional: mereka menjulukinya dengan sebutan "santri kolot" atau santri "teklekan".

Pada masa itu sebenarnya sudah ada organisasi pelajar, yakni Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), namun organisasi tersebut dinilai belum bisa menampung aspirasi santri pondok pesantren. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Februari 1947 ketika Yoesdi Ghozali sedang ber'tikaf di Masjid Besar Kauman Yogyakarta, terlintas dalam pikirannya, gagasan untuk membentuk suatu organisasi bagi para pelajar Islam yang dapat mewadahi segenap lapisan pelajar Islam. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam pertemuan di gedung SMP Negeri 2 Sekodiningratan,

Yogyakarta. Kawan-kawannya yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain: Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji, dan semua yang hadir kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi pelajar Islam.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan Yoesdi Ghozali (1947) dalam Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), 30 Maret-1 April 1947. Karena banyak peserta kongres yang menyetujui gagasan tersebut, maka kongres kemudian memutuskan melepas GPII. Bagian pelajar untuk bergabung dengan organisasi pelajar Islam yang akan dibentuk. Utusan kongres GPII yang kembali ke daerah-daerah juga diminta untuk memudahkan berdirinya organisasi khusus pelajar Islam di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti keputusan kongres, pada Minggu, 4 Mei 1947, diadakanlah pertemuan di kantor GPII, Jalan Margomulyo 8 Yogyakarta. Pertemuan itu di hadiri Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani dan Amien Syahri mewakili Bagian Pelajar GPII yang siap dilebur di organisasi pelajar Islam yang akan di bentuk, Ibrahim Zarkasji, Yahya Ubeid dari Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS), Multazam dan Shawabi dari Pergabungan Kursus Islam Sekolah Menengah (PERKISEM) Surakarta serta Dida Gursida dan Supomo NA dari Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII) Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Yoesdi Ghozali itu kemudian memutuskan berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) tepat pada pukul 10.00, 4 Mei 1947 di Yogyakarta.

Setelah dideklarasikannya PII pada tanggal 4 Mei 1947 di Yogyakarta oleh Yoesdi Ghazali, Amin Syahri, Anton Timur Djaelani, Ibrahim Zarkasji dan lain-lain,

PII terus mengalami perkembangan. Perkembangannya didukung oleh meleburnya organisasi-organisasi pelajar di daerah-daerah kedalam PII dan leburnya golongan pelajar dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) menjadi PII. GPII yang telah memiliki cabang di hampir di seluruh provinsi di Indonesia menyerukan kepada seluruh anggotanya yang pelajar untuk segera meleburkan diri ke dalam organisasi PII. Seruan itu memudahkan usaha pembentukan PII di daerah-daerah.

Ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara dalam sistem kenegaraan Indonesia menjadi bukti pasti kegagalan perjuangan kalangan Islam. Pancasila di pandang sebagai dasar Negara yang paling sesuai dengan kondisi dan perkembangan politik Indonesia (Santosa, 2004 : 95) pada perkembangannya saat rezim Orde Baru berkuasa pemerintah Orde Baru telah menerapkan kebijakan refresif untuk mencegah naiknya sayap Islam. Hal ini menurut Syukur (2003: 27) pemerintahan Orde baru sejak awal menyadari tentang kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam setelah jatuhnya kekuatan ekstrim kiri (PKI) yang kemudian secara formal di perkuat dengan keputusan pembubaran PKI. Tuduhan yang sering ditimpakan pada kalangan Islam pada saat pemerintahan Orde Baru yaitu ingin mengganti Dasar Negara Pancasila dengan Islam, seperti cita-cita kalangan Islam pada saat pembentukan Dasar Negara pada sidang Konstituante 1957-1959.

Negara pada masa Orde Baru menjadi sangat kuat. Disisi militer dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan, antara lain juga menurut Maliki (Anthonio Grausci, 1992: 595) mengenai teori Hegemoni dan koersif, karena Pemerintahan Orde Baru menerapkan cara-cara hegemoni dikombinasikan dengan cara penekanan. Hegemoni

cara menundukan orang lain dengan tidak melakukan kekerasan, melainkan menggunakan cara-cara kultural. Seperti, penggunaan ideologi, agama, nilai-nilai budaya tertentu sebagai alat kekuasaan. Dalam kerangka inilah pemerintah Orde Baru menggunakan Ideologi Pancasila sebagai instrument berkuasa.

Jenderal Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai presiden RI pada tahun 1968 menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi harta warisan yang tidak boleh diubah, dikurangi maupun ditambah padahal pada waktu pembuatannya Ir. Soekarno menyebutkan UUD 1945 masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa diubah. Bahkan sejak tahun 1976 pemerintah Orde Baru mengemukakan gagasan untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Syukur, 2003: 28). Keinginan Presiden Soeharto menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, dengan alasan mencegah munculnya permasalahan yang menyudutkan Pancasila karena tidak ada usaha serius yang dilakukan pihak pemimpin Negara untuk menjadikan nilai-nilai pancasila sebagai kenyataan dalam kehidupan bangsa (Santosa, 2004: 98). Sedangkan menurut Maliki (David Bourchier, 2001: 118) dari pidato Ali Murtopo sebagai tangan kanan dari Presiden Soeharto bahwa “perilaku konfrontatif dan kontradiktif tidak memiliki tempat dalam ideologi Pancasila, sebaliknya yang dikembangkan oleh Pancasila adalah prinsip “kekeluargaan”. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pacasila (P4) dimaksudkan untuk “mengindonesiakan orang Indonesia (memperdalam pancasila)” sehingga sebagai bangsa Indonesia memahami jati dirinya, dan dengan demikian tidak akan mungkin

dipengaruhi oleh komunis atau ideologi lain”. Dalam hal ini akan mendiskreditkan Pancasila dan menjadi argumen utama untuk menolak Pancasila.

Pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru menyusun penafsiran Pancasila menjadi Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disahkan menjadi Tap No. II MPR/1978. Hal yang menarik dari kebijakan yang ditawarkan Presiden Soeharto untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu membentuk pribadi Pancasila, masyarakat Pancasila, dan Negara Pancasila yang justru bertolak belakang dengan gagasan dari Kalangan Islam yang menawarkan Islam sebagai konsep alternatif untuk membentuk pribadi, masyarakat, dan Negara yang sesuai dengan syari'at Islam. Kalangan Islam yang berada di luar parlemen maupun yang berada di dalam parlemen menjadi penentang utama terhadap gagasan presiden Soeharto untuk “meresapi, menghayati, dan mengamalkan pancasila dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat” (Syukur, 2003: 29).

Fraksi Persatuan Pembangunan yang merupakan wakil kalangan Islam di Parlemen melakukan aksi *walk out* atau keluar dari ruang sidang Komisi B dalam sidang MPR pada tanggal 18 Maret 1978. Penentangan yang dilakukan oleh kalangan Islam terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4). menurut Deliar Noer dalam (Syukur 2003: 32), menyatakan bahwa kecenderungan menjadikan Pancasila sebagai acuan menilai kualitas moral terlebih dalam kehidupan sehari-hari karena bertentangan dengan perintah agama yaitu bahwa setiap muslim harus menjadikan Syariah Islam Sebagai acuan menilai kualitas moral. menurut

Shalahuddin Sanusi (1987: 238) mengatakan bahwa semua golongan-golongan umat Islam tujuannya satu yaitu menegakan dan melaksanakan syari'at Islam.

Menurut Nicolo Machiavelli (Suwirta, 2001: 25) menyatakan bahwa untuk melanggengkan kekuasaan penguasa yang kuat, adalah mereka yang memiliki tentara yang kuat dan seorang penguasa itu bisa memerintah dengan cara yang keji, kejam, dan jahat. Pemerintah orde baru mencoba mengaplikasikan teori tersebut pada saat pemerintahannya. Penggerak utama untuk melaksanakan kebijakan ideologi orde baru ini diserahkan kepada Aparat Intelejen, setelah berhasil menuntaskan kebijakan terhadap kaum komunis maka target selanjutnya diarahkan kepada kalangan Islam. Kebijakan terhadap kalangan Islam ini terbilang unik di mana pemerintah orde baru menggunakan ideologi Pancasila sebagai instrument berkuasa, mulai dari kebijakan Eka Prasetya Pancakarsa (P4) sampai kebijakan penunggalan azas bagi organisasi politik hingga munculnya Radikalisme Islam. Menurut Jeong (Novri, 2009: 2). Apa yang dilakukan oleh Orde Baru adalah pendekatan keamanan tadisional (*'traditional security'*). Suatu pendekatan yang mengutamakan *military power* dan tidak menjadikan negoisasi sebagai perhatian politik rezim. Pendekatan ini mengabaikan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang tumbuh dari hubungan asimetris dan hierarkis, dalam suatu sistem yang sedang berjalan.

Pada sekitar tahun 1978, banyak kalangan Islam yang sangat kecewa terhadap keputusan pemerintah yaitu menjadikan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Menurut Pelajar Islam Indonesia (PII), point-point yang ada di dalam Pancasila merupakan bagian dari dasar Islam sehingga kurang bagus jika dijadikan dasar

Negara. Sekitar tahun 1968, pimpinan Indonesia dalam hal ini presiden Ir. Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto yang nantinya akan berpengaruh sangat besar bagi para Pelajar Islam Indonesia (PII), dikarenakan dasar Negara yaitu Pancasila dijadikan asas tunggal negara Indonesia sehingga membuat partai-partai atau organisasi-organisasi Islam diwajibkan untuk merubah asas Islam menjadi Pancasila. Perubahan ini dianggap sebagai pukulan telak terhadap organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) yang dianggap sebagai salah satu organisasi yang sangat besar di Indonesia pada saat itu, dikarenakan pada saat itu banyak organisasi Islam yang merubah dasar keorganisasian/ partai menjadi Pancasila, sedangkan para Pelajar Islam Indonesia (PII) tidak mau merubah syariat Islam menjadi asas tunggal yaitu Pancasila. Akibat dari pembangkangan tersebut, organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dianggap sebagai organisasi terlarang/ illegal oleh pihak pemerintah.

Untuk mengetahui kelanjutan tentang eksistensi organisasi PII yang dianggap illegal oleh pemerintah Orde Baru karena penolakan terhadap asas tunggal Pancasila, maka penulis berusaha untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dengan menghubungkan peranan Pelajar Islam Indonesia (PII) pada masa pemerintahan orde baru, organisasi-organisasi keislaman ini sering dianggap sebagai suatu organisasi yang mendorong perubahan secara mendasar atas apa yang terjadi saat rezim orde baru berkuasa.

Penulis berusaha untuk meneliti hal tersebut di atas, dengan cara melakukan kajian literatur. Dengan meneliti masalah eksistensi PII pasca penerapan asas tunggal. Menjawab terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di atas, oleh karena itu

penulis akan berusaha mendeskripsikan bagaimana eksistensi pasca asas tunggal yang dirumuskan dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut : *“Penolakan Asas Tunggal Pancasila oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat Tahun 1980-1987”*.

1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka sebagai gambaran yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini secara umum dirumuskan sebagai berikut ”Penolakan Asas Tunggal Pancasila oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat Tahun 1980-1987”

Secara khusus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Pelajar Islam Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan organisasi Pelajar Islam Indonesia pada masa Orde Baru?
3. Mengapa Pelajar Islam Indonesia menolak kebijakan asas tunggal Pancasila yang di buat oleh pemerintah Orde Baru?
4. Bagaimanakah respon organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat terhadap kebijakan tentang asas tunggal yang dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Peranan Pelajar Islam Indonesia terhadap perkembangan Negara Indonesia terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan ke dalam rumusan masalah di atas, yang diantaranya :

1. Menjelaskan latar belakang terbentuknya Pelajar Islam Indonesia.
2. Menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi Pelajar Islam Indonesia pada masa Orde Baru organisasi Pelajar Islam Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.
3. Mengetahui alasan Pelajar Islam Indonesia menolak asas tunggal Pancasila yang di buat oleh pemerintah.
4. Mendeskripsikan respon yang dilakukan oleh organisasi Pelajar Islam Indonesia di Jawa Barat terhadap kebijakan-kebijakan tentang asas tunggal yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk menambah literatur penulisan sejarah organisasi di Indonesia, khususnya tentang Pelajar Islam Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan penulisan sejarah mengenai perkembangan organisasi pergerakan Pelajar Islam Indonesia khususnya di Jawa Barat.

3. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru terhadap organisasi keislaman.
4. Untuk menjelaskan pengetahuan kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya, bahwa pada saat pemerintahan orde baru, ada sebuah organisasi yang ikut serta atau berperan dalam melawan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap organisasi-organisasi Islam.

1.5 Metode dan Teknik Penulisan

1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode Historis menurut Louis Gottscalk (dalam Ismaun, 2005: 34) adalah rekonstruksi imajinatif tentang gambaran masa lampau peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis analisis berdasarkan bukti-bukti dan data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam penelitian sejarah ini adalah :

a. Heuristik

Sebuah peristiwa yang terjadi serta dialami oleh manusia pada masa lampau adalah yang meninggalkan jejak-jejak peninggalan bukti yang menyangkut kehidupan masyarakat manusia. Semuanya itu dijadikan objek yang diteliti, dikaji, dan disimpulkan oleh sejarahwan. Objek tersebut diteliti melalui tahap Heuristik, (Ismaun, 2005: 25). Maka Heuristik merupakan serangkaian upaya dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan

dengan masalah yang akan dikaji. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan sumber yaitu dengan mencari literatur yang sesuai dengan masalah, baik berupa artikel, majalah, koran, jurnal, ataupun melalui wawancara, mencari literatur di Webster dan sumber tertulis lainnya yang relevan untuk pengkajian permasalahan yang akan dibahas.

b. Kritik Intern dan Ekstern

Pada tahap kritik dan analisis sumber ini penulis berupaya melakukan penilaian dan mengkritisi data atau sumber-sumber yang terdapat dalam evidensi-evidensi telah ditemukan, seperti hasil eksplorasi literatur lainnya yang dianggap relevan. Seperti yang diungkapkan dalam bukunya Ismaun yang berjudul *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, sumber-sumber ini harus dipilih melalui dua tahap. *Pertama*, Kritik ekstern yaitu kritik luar untuk menilai otentisitas sumber sejarah. *Kedua*, tahap kritik intern yaitu kritik dalam untuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan perbuatannya, tanggung jawab dan moralnya (Ismaun, 2005 : 50)

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap untuk menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dengan cara mengelola fakta yang telah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung kajian penulis. Pada tahap ini penulis memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh selama penelitian.

d. Historiografi

Menurut Gottscalk (1975 : 32-), dalam bukunya Ismaun (2005 : 28). Historiografi ialah usaha mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam buku maupun artikel maupun perkuliahan sejarah.

2. Teknik Penulisan

Dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk bahan pengkajian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta dan data dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang dikaji, baik literatur lokal maupun asing yang semua itu dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Sumber yang didapatkan oleh penulis hanyalah sumber sekunder. Teknik wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai narasumber yang dianggap mengetahui data-data atau informasi tentang Pelajar Islam Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penyusunan skripsi ini, berikut penulis mencantumkan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bagian, yang kemudian dijabarkan seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan memaparkan beberapa sub-sub bab. Bab I terdiri dari sub-sub bab yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penulisan, penjelasan judul, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai buku-buku yang digunakan sebagai sumber literatur yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN,

Dalam bab ini penulis mengkaji tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. Dalam bab ini juga, penulis berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk

merampungkan rumusan penelitian, metode penelitian ini harus mampu menjelaskan langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus diuraikan secara rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil temuan dan pandangan penulis, serta jawaban secara umum dari permasalahan yang dikaji.

Bab kesimpulan merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA